

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Faried. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al Atok, Rosyid. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Al- Fatih, Sholahuddin, dkk. *Monograf Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia : Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: FH UI.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*. Terjemahan oleh Johanes Usfunan et.al. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Arifin Hosein, Zainal. 2009. *Judicial Review Di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- A.Garner, Bryan. 1999. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn : West Group.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diani Sadiawati, dkk. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: YSHK.
- Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed). 2005. *Demokrasi Klasik & Modern – Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2021. *Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif*. Banyumas: Amerta Media.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (American Law: An Introduction)*, Penerjemah oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Hasan, Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.

- Huda, Ni'matul dan R.Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : Nusa Media.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isra, Saldi et all. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*. Jakarta : Sekjen MK & PUSAKO FH Universitas Andalas.
- Isharyanto. 2016. *Kedaulatan Rakyat dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945*. Yogyakarta: Penerbit WR.
- J.M. Oto, J. Arnscheidt, B. van Rooij. 2008. *Law Making For Development : Exploration Into the Theory and Practice of International Legislative Projects*. Belanda: Leiden University Press.
- Kansil , C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Ilmu Negara (umum dan indonesia)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Solly. 1983. *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2017. *Politik hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, B.N. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat : Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Jakarta: Nusamedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Riskiyono, Joko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang : Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu*. Depok : Nadi Pustaka.
- Scott, Renee. 2009. *An Analysis of Public Participation in the South African Legislative Sector*. Stellenbosch : Stellenbosch University.

- Saifuddin. 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Subekti, Valina Singka. 2008. *Menyusun Konstitusi Transisi : Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Stirling, Andy. 2005. *Science and Citizen Globalization and The Challenge of Engagement: Opening Up or Closing Down? Analysis, Participation and Power in The Social Appraisal Technology*. New York: Zed Book.
- Titik Triwulan Tutik. 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Ctk. Ketiga*. Kharisma Jakarta: Putra Utama.
- Wilcox, David. 2003. *The Guide to Effective Participation*. Brighton: Delta Press.
- Wibowo, Edi, et.al. 2004. *Kebijakan Publik dan Budaya*. Yogyakarta: YPAPI.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

- Agus Firmansyah dan Dedi Supriyadi, “Peluang dan Tantangan dalam Memetakan Opini Publik di Media Sosial”, *Jurnal Kaganga*, Vol.2 No.1, (April 2018).
- Bambang Arianto, “Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM*, Vol.18 No.2, (November 2014).
- Daya Negeri Wijaya. “Jean-Jacques Rousseau dalam Demokrasi”. *Indonesian Political Science Review*. Vol.1 No.1. (Januari 2016).
- Fahmi Ramadhan Firdaus, “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 7 No 3, (September 2020).
- Fitri Pebriani dan Nuzul Asri Safitri, “Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Peraturan-Undang di Indonesia (Studi Kasus Situs : Change.Org)”, *Jurnal Khazana Hukum*, Vol.3 No.3, (November 2021).

- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “*Open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13 No.3, (September 2019).
- Jufrina Rizal. “Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.3 No.3. (September 2003).
- Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. *Jurnal Aspirasi*. Vol 6 No.2. (Desember 2015).
- M.Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 2 No. 3, (Desember 2013).
- Nurrahman Aji Utomo, “ Mengurai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 4, (Desember 2016).
- Ricca Anggraeni, “*The Must Of Academic Text And Their Normative Effect On Quality Of Law*”, *International Journal of Scientific & Technology Research*, Vol.8 Issue.11, (November 2019).
- Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti. “Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2 No.2. (Mei 2020).
- Susi Dwi Harijanti, “Perppu sebagai *Extra Ordinary Rules* : Makna dan Limitasi”, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol.2 No.1, (April 2017).
- Syukri Asy’ari,dkk. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan tahun 2003-2012)”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.10 No.4, (Desember 2013).
- Syamsuddin. “Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. *Jurnal Idaarah*. Vol.1 No.1 (Juni 2017).
- Sherry R. Arnstein. “A Ladder of Citizen Participation”. *Journal of the American Planning Association*. Vol. 85 No.1 (2019).
- Shannon C McGregor, “Social Media as Public Opinion : How Journalist Use Social Media to Represent Public Opinion”, *Journalism*, VOL.20 (8), 2019.
- Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3 No.2, (Maret 2019).

Tengku Rika Valentina. "Peluang Demokrasi dan Peta Perilaku Pemilih terhadap Partai Politik untuk Pemilu 2009 di Yogyakarta". *Jurnal Demokrasi*. Vol.1 No.2. (2009).

Laporan Penelitian, Tesis, Disertasi, dan Majalah :

Afrizal. 2003. *Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang : Studi Kasus Rancangan Undang-undang Yayasan dan Rancangan Undang-undangan Penyiaran*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Indonesia. Depok.

Fauzi Jazuli. 2014. *Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program Legislasi Nasional*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Imam Anshori Saleh. 2008. *Urgensi Program Legislasi Nasional dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Muslimah. 2018. *Politik Hukum Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*. Disertasi. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Rodolf Ferdinand Purba Siboro. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang*. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Saifudin. 2006. *Proses pembentukan Undang-Undang : Studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang di Era Reformasi*. Disertasi. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Franky Alexander Hendra Z. 2019. *Pengujian Formil Undang-Undang Menurut UUD 1945*. Disertasi. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Aflina Mustafainah, dkk. 2021. *CATAHU Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020 : Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta : Komnas Perempuan.

Ahmad Hanafi, dkk. 2020. *Laporan pemantauan DPR tahun 2019 : Tantangan efektifitas, transparansi, dan representasi yang belum terjawab*. Jakarta : IPC.

Andi Irman Putra. 2008. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945 (Pasca Amandemen)*. Jakarta : BPHN.

Agil Oktaryal dan Kurnia Ramadhana. 2020. *Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi UU KPK*. Jakarta : PSHK&ICW.

BPHN. 2008. *3 Dekade Prolegnas*. Jakarta : BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Charles Simabura, Ronald Rofiandri, & Lidwina Inge. 2021. *Laporan Studi Dokumen : Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19*. Jakarta : Cakra Wikara Indonesia.

Indonesia Parliamentary Center. 2020. *Tantangan Reformasi Parlemen : Meningkatkan Efektivitas Fungsi Legislasi*. Jakarta : IPC.

-----, 2020. *Laporan Pemantauan : Catatan Legislasi Tahun 2020 dan Outlook Legislasi 2021*. Jakarta : IPC.

-----, 2022. *Indeks Kinerja Legislasi DPR RI Tahun Sidang 2020-2021 (High Effectivity Low Accountability)*. Jakarta : IPC.

-----, 2020. *Laporan Pemantauan Masa Sidang 1 DPR RI : Tantangan Efektifitas, Transparansi, dan Representasi yang Belum Terjawab*. Jakarta : IPC.

Maria Farida dkk. 2008. *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta: BPHN.

PSHK. 2019. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia : Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta : YSHK.

-----, 2013. *Catatan Kinerja DPR Tahun 2012 : Fondasi Tahun Politik*. Jakarta: PSHK.

-----, 2019. *Legislasi Masa Pandemi : Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020*. Jakarta : YSHK.

Rudy,dkk. 2016. *Rekonstruksi Pembangunan Legislasi Berbasis Hukum Pengayoman*. Lampung: Universitas Lampung.

Yuliandri, dkk. 2014. *Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta : Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN.

Internet dan Berita Online :

Antoni Putra, “Sengkarut program legislasi nasional 2022”, Pusat Studi Hukum Konstitusi, diakses di <https://pshk.or.id/blog-id/sengkarut-program-legislasi-nasional-2022/>, 21 Januari 2022, Pukul 13.20.

-----, “ 3 Cara Mendesain Ulang Prolegnas Agar Lebih Efektif”, Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), diakses di

<https://www.pshk.or.id/blog-id/3-cara-mendesain-ulang-prolegnas-agar-lebih-efektif/>, 26 Januari 2022, Pukul 18.25.

Arbain, “Evaluasi Prolegnas 2015-2019”, Indonesia Parliamentary Center, diakses di <http://ipc.or.id/evaluasi-terhadap-program-legislasi-nasional-2015-2019-dewan-perwakilan-rakyat-1/>, 17 Maret 2022, Pukul 07.50.

Abdul Ghani, “Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih”, diakses di <https://www.pstkhz-musthafa.or.id/problematika-rekonstruksi-ushul-fiqih-2/>, 12 Januari 2022, pukul 13.00

BPHN, “Prolegnas Dalam Pembentukan Undang-Undang di Pemerintah”, *Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan*, Mei 2020, diakses di <https://pushep.or.id/prolegnas-dalam-pembentukan-undang-undang-di-pemerintah/>, 10 oktober 2021, pukul 19.05

Bivitri Susanti, “Konstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Legislasi”, Pusat Studi Hukum Konstitusi, diakses di <https://www.pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/>, 18 september 2021, pukul 17.40.

Berita Legislasi, “DPR Setujui RUU IKN”, diakses di laman DPR RI, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU>, 21 Januari 2022, Pukul 13.37.

DPR RI, Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penggunaan Aplikasi Simas PUU 2021, Pusat Perancangan UU Badan Keahlian DPR, diakses di <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/berita/foto/d590c2c6c4a2d742f08ebfb45452deee.pdf>, 14 juni 2022, pukul 12.50.

Firmansyah, “Urgensi Pembentukan Instrumen Perencanaan Legislasi”, Pusat Studi Hukum Konstitusi, diakses di <https://pshk.or.id/blog-id/urgensi-pembentukan-instrumen-perencanaan-legislasi/>, 7 juni 2022, Pukul 15.20.

Haryanti Puspa Sari, “16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks?page=all>, 10 september 2021, pukul 14.00.

Haryanti Puspa Sari, “Tok! DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/13150661/tok-dpr-sahkan-ruu-mahkamah-konstitusi>, 10 september 2021, pukul 23.15.

Indikator, “Trusts terhadap Institusi Politik, Isu-Isu Mutakhir, dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu”, diakses di https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2022/04/RILIS-03-04-22_SurveiNasional_2022_3-APRIL_2022.pdf, 14 juni 2022, pukul 10.00.

Kemenkumham, “Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 Harus Sesuai Aspek Kebutuhan Bukan Keinginan”, diakses di <https://www.kemenkumham>

.go.id/berita/berita-pusat/prolegnas-prioritas-ruu-tahun-2017-harus-sesuai-aspek-kebutuhan-bukan-keinginan, 20 oktober 2021, pukul 13.30.

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, diakses di <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, 11 oktober 2021, pukul 11.00.

PSHK, “Pengesahan UU Cipta Kerja: Legislasi Tanpa Ruang Demokrasi”, diakses di <https://pshk.or.id/publikasi/penge-sahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang-demokrasi/>, 10 septem ber 2021, pukul 14.10.

Ronald Rofiandri, “Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi”, Pusat Studi Hukum Konstitusi, diakses di <https://www.pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>, 19 oktober 2021, pukul 19.05.

Rully R Ramli, “RUU Minerba Disahkan menjadi Undang-Undang”, diakses di <https://money.kompas.com/read/2020/05/12/174738026/ruu-minerba-resmi-disahkan-jadi-undang-undang>, 10 september 2021, pukul 14.15.

Risalah Sidang Perkara No. 100/PUU-XVIII/2020, diakses di https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_11161_PERKARA%20NOMOR%20100.PUU-XVIII.2020%20tgl.%2019%20November%202020.pdf, hlm.12-13, 10 september 2021, pukul 23.00.

Ratna Puspita & Febrianto, “Ini alasan RUU Ibu Kota Negara masuk prolegnas prioritas”, diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qggwoh428/ini-alasan-ruu-ibu-kota-negara-masuk-prolegnas-prioritas>, 21 Januari 2022, Pukul 13.25.

Rofiq Hidayat, “Pembentuk UU Rombak Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik”, Hukum Online, diakses di <https://bit.ly/3n4JTkZ>, 23 Januari 2022, Pukul 12.00.

Tsarina Maharani, “Hampir Sebulan Disahkan, UU Cipta Kerja Belum Juga Bisa Diakses Publik”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/02/10171791/hampirsebulan-disahkan-uu-cipta-kerja-belum-juga-bisa-diakses-publik?page=all>, 10 september 2021, pukul 14.15.

Vitoria Mantalean, “Mega proyek IKN, 20.000 Masyarakat adat tersingkir dan dugaan hapus dosa korporasi”, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/08204891/megaproyek-ikn-20000-masyarakat-adat-tersingkir-dan-dugaan-hapus-dosa?page=all>, 23 Januari 2022, Pukul 10.13.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses di <https://kbbi.web.id/rencana>, 05 oktober 2021, pukul 20.00.

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan, dan Risalah Sidang :

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undnag-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil dan Materiil UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Risalah Rapat Panja V RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI, tanggal 27 Mei 2011.

Risalah Rapat Panja XII RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI, tanggal 20 Juli 2011.

Risalah Rapat TIM Sinkronisasi RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI, tanggal 18 Juli 2011.

Risalah Rapat Panja X RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR RI, tanggal 27 juni 2011.